

**PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP OPTIMALISASI PEMANFATAAN
ASET TETAP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Muhammad Ridwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 5.5 Banjarmasin

mridwan.tanbu@gmail.com

Abstract: This study aims to determine and analyze the Influence of inventory, legal audit and asset assessment in partially and simultaneously to the optimization of fixed assets in the Regional Financial and Asset Management Agency of Tanah Bumbu Regency. This research method uses a survey method with 63 respondents and then analyzes the data using the instrument test and multiple linear regression analysis. The results showed that the Inventory has a partial influence to the optimization of fixed assets, which is indicated by t count as 9,122. Legal audit partially influences to the optimization of fixed assets, which is indicated by t count as 8.452. The asset assessment has a partial Influence to the optimization of fixed assets, which is indicated by t count as 2.513. Inventory, Legal audit and Asset Assessments are simultaneously influence to the optimization of fixed assets in the Regional Financial and Asset Management Agency of Tanah Bumbu Regency, which is indicated by F count as 81.750.

Keywords: *Inventory, Legal audit, Asset Assessment and Optimization of fixed assets.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inventarisasi, legal audit dan penilaian secara parsial dan secara simultan terhadap optimalisasi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan jumlah responden sebanyak 63 orang kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan uji instrument dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inventarisasi berpengaruh secara parsial terhadap optimalisasi aset tetap yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 9,122. Legal audit berpengaruh secara parsial terhadap optimalisasi aset tetap yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 8,452. Penilaian berpengaruh secara parsial terhadap optimalisasi aset tetap yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,513. Inventarisasi, Legal audit dan Penilaian berpengaruh secara simultan terhadap optimalisasi aset tetap Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 81,750.

Kata kunci: *Inventarisasi, Legal audit, Penilaian dan Optimalisasi Aset*

Latar Belakang

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu member kekuatan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset daerah yang optimal dengan mengedepankan good governance disatu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Tanah dan bangunan mempunyai karakteristik yang unik karena sifatnya yang terbatas tetapi kebutuhan manusia akan tanah dan bangunan terus meningkat, sehingga tanah dan bangunan mempunyai nilai. Hidayati dan Harjanto (2003: 82-85) mengatakan bahwa nilai tanah dan bangunan dipengaruhi oleh karakteristik fisik yang pemanfaatannya harus benar-benar diperhatikan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, serta dengan adanya pembaharuan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah membawa perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah. Pasal 1 Undang- Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dapat dinilai dengan uang tidak hanya mencakup hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut baik berupa barang maupun uang. Regulasi-regulasi ini menunjukkan bahwa posisi aset pemerintah daerah sangatlah

penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu masalah utama pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset (Wardhana, 2005:7). Karena inventarisasi aset ini merupakan hal yang sangat penting di dalam siklus pengelolaan aset. Aset tetap sebagai komponen utama dari aset daerah, oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna, sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pengelolaan aset terutama tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan dan keberadaan manusia. Salah satu bentuk pengelolaan aset adalah konsep *real property*, yaitu suatu hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah, misalnya hak milik atau hak guna bangunan berikut bangunan (permanen) yang didirikan di atasnya atau tanpa bangunan. Pengertian penguasaan di atas perlu dibedakan antara penguasaannya secara fisik atas tanah dan/atau bangunan yang disebut *real estate*. Sedangkan *real property* merupakan kepemilikan sebagai konsep hukum (penguasaan secara yuridis) yang dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah (Siregar, 2004)

Menurut Siregar (2004: 518-519) dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset dan barang daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan pengelolaan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, di mana jika keempat tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan

menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparansi.

Adanya fenomena tersebut sehubungan dengan manajemen aset yang terdiri dari inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian aset, serta optimalisasi pengelolaan. Sehubungan dengan kondisi temuan penelitian oleh Aulia, dkk (2015) yang menyebutkan pengaruh yang positif antara inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) pada pemerintah daerah.

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kabupaten Tanah Bumbu selalu merayakan hari jadinya pada tanggal 8 April setiap tahunnya. Ibu kota kabupaten terletak di Batulicin, dan pusat pemerintahan kabupaten berada di Kelurahan Gunung Tinggi yang dulunya bernama Desa Pondok Butun. Adapun yang menjadi sentra kegiatan usaha dan ekonomi adalah kecamatan Simpang Empat, yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Batulicin. Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 10 kecamatan, 5 kelurahan, dan 144 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 310.309 jiwa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 066,96km² dan jumlah penduduk sebanyak 267.913 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010), dan pada tahun 2019 berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Tanah Bumbu mencapai 3181

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi di berbagai sektor dan untuk menunjang optimalisasi potensi daerah yang ada dan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Daerah didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Sarana dan Prasarana yang

merupakan aktiva tetap (*fixed aset*) yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut diklasifikasikan berupa: tanah, jalan dan jembatan, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, buku perpustakaan, barang bercorak seni dan budaya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah pelaksanaan manajemen aset atau pengelolaan asetnya yang meliputi prosedur penatausahaan inventarisasi dan identifikasi aset daerah secara fisik dan yuridis yang belum terlaksana dengan baik dan benar. Ketidaktertiban dalam pengelolaan *data base* aset, sehingga aset-aset yang dikelola Pemerintah Daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan dalam pengoptimalisasi dan pemanfaatan aset di masa yang akan datang. Implikasi atas pemanfaatan dari pengelolaan aset yang tidak optimal adalah tidak diperolehnya nilai yang terkandung dalam aset itu sendiri, misalnya dari aspek ekonomi adalah tidak diperolehnya *revenue* yang sepadan dengan besarnya nilai aset yang dimiliki atau dengan kata lain tingkat pengembaliannya rendah.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam tentang optimalisasi dari pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Kajian-kajian tersebut meliputi optimalisasi potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal yang dimiliki aset sehingga diharapkan daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatannya dalam rangka kemandirian daerah dalam hal pendanaannya, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan manajemen aset di daerah.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah inventarisasi secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Apakah legal audit secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu?
3. Apakah penilaian secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu?
4. Apakah inventarisasi, legal audit dan penilaian secara simultan berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu?

Studi Literatur

Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang, karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan seperti *corporate finance managers*, perbankan, *real estate*, perusahaan asuransi bahkan sektor pemerintahan yang lain, sehingga karir akan berkembang (Musthafa:2013:1). Pentingnya manajemen keuangan, seperti dikemukakan diatas, bahwa mempelajari Manajemen Keuangan (*Financial Management*) dapat menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana dan keputusan kebijakan dividen.

Mahsun (2003) mengatakan bahwa manajemen aset sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan properti di lingkungan Pemda untuk mencerminkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Permasalahan klasik yang sering dijumpai dalam pengelolaan aset properti adalah status hukum properti yang tidak jelas. Artinya, siapa sebenarnya yang

mempunyai hak kepemilikan atas aset tersebut sering menjadi sengketa di antara unit-unit yang ada. Kurangnya kebudayaan efisiensi untuk manajemen aset ini mengakibatkan berbagai hubungan perjanjian menjadi tidak optimal serta tidak adanya hubungan yang relevan antara Pemda sebagai pemilik dengan para penyewa dan manajer.

Harus dipahami oleh Pemerintah Daerah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah. Kenyataan sampai saat ini aset daerah masih dikelola seadanya, sebatas inventarisasi belaka (pencatatan akuntansi). Aset daerah masih dikonsultasikan dengan arus kas negatif, dibanding sebagai aset yang produktif dan memberikan pendapatan. Kondisi pemanfaatan terhadap aset daerah tersebut membuktikan bahwa aset daerah sebagai sumber daya lokal daerah menunjukkan utilitasnya yang masih rendah, hal ini terjadi karena di hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia belum ada pemahaman pengelolaan aset daerah secara utuh dalam kerangka manajemen aset (*public/ corporate real properti management*).

Britton *et al.* (1989 dalam Siregar 2004), mengatakan “*define good asset management in terms of measuring the value of properties (assets) in monetary terms and employing the minimum amount of expenditure on its management*”.. Manajemen aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat bermula dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, dan strategis.

Manajemen aset memiliki ruang lingkup utama untuk mengontrol biaya pemanfaatan ataupun penggunaan aset dalam mendukung operasionalisasi Pemerintah Daerah. Selain itu, ada upaya pula untuk melakukan inventarisasi aset-aset Pemda yang tidak digunakan. Namun dalam perkembangan ke depan, ruang lingkup manajemen aset lebih berkembang dengan memasukkan nilai aset, akuntabilitas pengelolaan aset, *land audit*

yaitu audit atas pemanfaatan tanah, *property survey* dalam kaitan memonitor perkembangan pasar properti, aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan aset dan optimalisasi pemanfaatan aset. Perkembangan yang terbaru, manajemen aset bertambah ruang lingkungannya hingga mampu memantau kinerja operasionalisasi aset dan juga strategi investasi untuk optimalisasi aset (Siregar, 2004).

Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset dan barang daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang meliputi perencanaan dan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya, pengendalian dan pengawasan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.06/2009 penertiban barang milik daerah mencakup kegiatan inventarisasi, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjutnya. Tujuan penertiban barang milik daerah mewujudkan pengelolaan BMD yang baik dan menindaklanjuti temuan BPK, maka objek penertiban BMD adalah seluruh BMD yang berasal dari APBD dan perolehan yang sah.

1. Inventarisasi

Siregar (2004) menyatakan bahwa manajemen aset sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yang pertama adalah inventarisasi. Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/ jumlah, jenis alamat dan lain-lain. Aspek yuridis/legal adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/ labeling pengelompokan dan pembukuan/ administrasi sesuai tujuan manajemen aset.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Melalui kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/ cara perolehan barang, ukuran barang/ konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan.

2. Legal audit

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/ dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan plang tanda kepemilikan dan penjagaan.

Penguasaan dan pemilikan tanah dan bangunan (*real property*) meliputi semua hak, hubungan-hubungan hukum, dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan real estate. Sebaliknya *real estate* meliputi tanah dan bangunan itu sendiri, segala benda yang keberadaannya secara alami di atas tanah yang bersangkutan, dan semua benda yang melekat dengan tanah itu, misalnya bangunan dan pengembangan tapak. Benda tak bergerak (*real property*) berupa tanah dan bangunan yang melekat di atasnya,

serta hak-hak yang terkait dan juga potensi kekayaan alam yang terkandung didalamnya (Siregar 2004: 182).

3. Penilaian

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai/dimiliki. Biasanya ini dilakukan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual.

Menurut Siregar (2004) penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Penilaian barang daerah dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan. Perbandingan data pasar berdasarkan estimasi harga pasar pada saat penilaian atas barang yang sejenis. Kalkulasi biaya berdasarkan estimasi biaya pengganti atau biaya reproduksi barang pada saat penilaian dikurangi dengan biaya penyusutan. Kapitalisasi pendapatan berdasarkan barang daerah yang memiliki karakteristik menghasilkan pendapatan. Penilaian barang daerah dilaksanakan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian barang, sesuai dengan peraturan perundangan, dan ditunjuk oleh Kepala Daerah. Mekanisme penilaian barang sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

4. Optimalisasi Aset Tetap

Siregar (2004) menyatakan bahwa optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki

potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kriteria untuk menentukan sektor-sektor unggulan tersebut harus terukur dan transparan. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor-faktor lainnya. Pemerintah Daerah biasanya memiliki aset yang berada di bawah pengusaannya. Namun cukup banyak aset yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Pemerintah Daerah.

Siregar (2004) menyatakan studi optimalisasi aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan (1) identifikasi aset-aset Pemerintah Daerah yang ada, (2) pengembangan data base aset Pemerintah Daerah, (3) studi untuk menentukan pemanfaatan aset dengan nilai terbaik (highest and best use) atas aset-aset Pemerintah Daerah dan memberikan hasil dan laporan kegiatan baik dalam bentuk data-data terkini maupun dalam bentuk rekomendasi, (4) pengembangan strategi optimalisasi aset-aset milik Pemerintah Daerah. Optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan adanya perantara investasi guna memasarkan aset-aset Pemerintah Daerah yang potensial dan kerja sama dengan investor, membuat dan memadukan dalam MOI (memorandum of investment) antara Pemerintah Daerah dan investor, dan memberikan jasa konsultasi kepada Pemerintah Daerah berkenaan dengan kerjasama dengan investor.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

yang beralamat di Jl. Dharma Praja No. 1 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah Eksplanatori yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Populasi dari penelitian ini adalah pihak yang berwewenang dan terlibat dalam pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini terdiri dari Pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah yaitu Kepala Daerah, Pengelola Barang Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Kuasa Pengguna Barang yaitu Kepala UPTD, Pengurus Barang SKPD, dan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah yang semuanya berjumlah 219 orang. Untuk mendapatkan sampel yang dapat mewakili populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin (dalam Umar, 2014:108) Dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidakteelitian ditetapkan sebesar 10%, maka dengan menggunakan rumus di atas diperoleh sampel sebesar 69 orang pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui Kuesioner, Wawancara, Dokumentasi dan Observasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah optimalisasi aset tetap (Y) yang merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut (Siregar, 2004). Sedangkan variabel independen terdiri dari Inventarisasi (X1), Legal audit (X2), dan Penilaian (X3).

Pengukuran data dalam penelitian ini adalah angket atau daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan kisi-kisi teoritik dalam bentuk skala Likert's. Pertimbangan menggunakan daftar pertanyaan karena pada penelitian survei, penggunaan kuesioner merupakan hal yang pokok untuk mengumpulkan data.

Metode analisis yang akan digunakan dalam rangka membuktikan hipotesis adalah analisis regresi linier

berganda yang dibantu dengan perangkat komputer program "SPSS For Window Versi 20". Uji asumsi klasik sebagai uji persyaratan suatu analisis regresi linier berganda. Dalam pengujian ini uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolonieritas, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Asumsi klasik penting dilakukan karena merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel independent, maka R^2 akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Sebelumnya kabupaten ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten terletak di Batulicin, dan pusat pemerintahan kabupaten berada di Kelurahan Gunung Tinggi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 1

tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan gabungan dari Bagian Keuangan dan Bagian Aset Sekretariat Daerah.

Pengelolaan Keuangan yang Baik mengandung maksud mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam batasan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

Adapun Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2020 adalah "Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta tertib penatausahaan barang milik daerah".

Misi adalah landasan Strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang secara bersama-sama akan diusahakan terwujud oleh seluruh komponen organisasi. Atas dasar itu semua, maka sesuai visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada maka ditetapkan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Terciptanya manajemen pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang efektif dan efisien;
2. Tertatanya administrasi pengelolaan aset daerah sehingga tercapai data dan nilai aset daerah yang meyakinkan.

2. Rekapitulasi Tanggapan Responden

Kuisisioner yang disebarakan berjumlah 69 eksemplar, semua kuisisioner memenuhi kriteria

karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian penelitian ini terdiri dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan. Dalam kuisisioner responden tidak perlu mencantumkan identitas pribadi atau nama untuk kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden.

2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil kuisisioner yang dilakukan maka hasil kuisisioner nampak pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Distribusi Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	21 - 30	0	0,00
2	31 - 41	46	66,70
3	41 - 50	20	29,00
4	> 51	3	4,30
Total		69	100,00

Sumber : Data primer, diolah penulis

Berdasarkan hasil kuisisioner diatas, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak adalah mereka yang berada pada rentang usia antara 31 - 40 tahun sebanyak 46 orang dengan tingkat persentase 66,67%, diikuti usia antara 41 - 50 tahun yaitu sebanyak 20 orang dengan tingkat persentase 29,0% dan responden yang paling sedikit adalah mereka yang berada pada usia lebih dari 51 tahun sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase 4,3%.

2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data jenis kelamin responden pada table 2 berikut:

Tabel 2
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pria	40	58,00
2	Wanita	29	42,00
Total		69	100,00

Sumber : Data primer, diolah penulis

Berdasarkan dari jenis kelamin, responden dibagi menjadi dua, yaitu pria dan wanita. Dari hasil kuisioner yang disebarakan ditemukan bahwa responden pria lebih banyak dibandingkan dengan responden wanita. Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 40 orang dengan tingkat persentase 58% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang dengan tingkat persentase 42%.

2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Terdapat empat klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat pendidikan responden. Hasil perhitungan persentase mendapatkan mayoritas dari mereka berdasar belatar belakang pendidikan sarjana (S1) dengan jumlah 28 orang dengan tingkat persentase mencapai 40,6%. Kelompok lain yang memiliki jumlah banyak adalah responden yang belatar belakang pendidikan SLTA dengan jumlah 27 orang dengan tingkat persentase mencapai 39,1%. Kemudian belatar pendidikan Magister (S2) dengan jumlah 10 orang dengan tingkat persentase mencapai 14,5% dan yang berpendidikan Diploma sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase mencapai 5,8%. Perincian sebaran pendidikan diperlihatkan pada tabel 5,3 berikut.

Tabel 3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SLTA	27	39,10
2	Diploma	4	5,80
3	Sarjana (S1)	10	14,50
4	Magister (S2)	28	40,60
Total		69	100,00

Sumber : Data primer, diolah penulis

2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan

Data pengelompokan responden berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Distribusi Responden Berdasarkan Golongan

No.	Kategori Golongan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Golongan II	16	23,20
2	Golongan III	28	40,60
3	Golongan IV	2	2,90
4	Non PNS	23	33,30
Total		69	100,00

Sumber : Data primer, diolah penulis

Pengelompokan responden berdasarkan golongan memperlihatkan bahwa responden yang paling banyak memiliki golongan III (tiga) sebanyak 28 orang dengan tingkat persentase 40,6%, responden dengan Non PNS (PTT dan Kontrak) sebanyak 23 orang dengan tingkat persentase mencapai 33,3%, kemudian responden golongan II (dua) sebanyak 16 orang dengan tingkat persentase 23,2%. Responden yang paling sedikit adalah golongan IV (empat) yaitu sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase 2,9%.

3. Analisis Hasil Penelitian

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dengan menginterpretasikan nilai rata-rata dari masing-masing indikator pada variabel penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai indikator apa saja yang membangun konsep model penelitian secara keseluruhan. Dengan deskripsi variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian menunjukkan gambaran penelitian responden terhadap variabel dependen dan variabel independen serta indikator masing-masing dari variabel tersebut.

1. Inventarisasi (X1)

Variabel inventarisasi (X1) pada penelitian ini diukur melalui tiga item pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Penilaian responden terhadap variabel inventarisasi dipersepsikan bagus dan positif terhadap jawaban dari pernyataan-pernyataan mengenai inventarisasi, terlihat dari nilai mean total inventarisasi sebesar 3,77 yang masuk pada kategori tinggi/bagus (antara 3,34 - 5,00). Untuk mengetahui gambaran penilaian responden terhadap variabel inventarisasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5
Frekuensi/ Prosentase Indikator Variabel Inventarisasi

No	Indikator	Distribusi Jawaban Responden										Mean	Kategori
		STS		TS		N		S		SS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	X11	0	0	0	0	13	18,84	19	27,54	37	53,62	4,35	Tinggi
2	X12	0	0	0	0	44	63,77	18	26,09	7	10,14	3,46	Tinggi
3	X13	0	0	0	0	45	65,22	13	18,84	11	15,94	3,51	Tinggi
Mean Total Inventarisasi											3,77	Tinggi	

Sumber : Data primer, diolah penulis

2. Legal Audit (X2)

Variabel legal audit X2 pada penelitian ini diukur melalui tiga item pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Untuk mengetahui gambaran penilaian responden terhadap variabel dengan audit, variabel dengan audit, disajikan dalam tabel 6 berikut.

Tabel 6
Frekuensi/ Prosentase Indikator Variabel Legal Audit

No	Indikator	Distribusi Jawaban Responden										Mean	Kategori
		STS		TS		N		S		SS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	X21	0	0	0	0	34	49,28	32	46,38	3	4,35	3,55	Tinggi
2	X22	0	0	0	0	12	17,39	14	20,29	43	62,32	4,45	Tinggi
3	X23	0	0	0	0	60	86,96	9	13,04	0	-	3,13	Sedang
Mean Total Legal Audit											3,71	Tinggi	

Sumber : Data primer, diolah penulis

Penilaian responden terhadap variabel legal audit pada tabel 6 dipersepsikan bagus dan positif terhadap jawaban dari pernyataan-pernyataan mengenai legal audit, dilihat dari nilai mean total legal audit sebesar 3,71, yang masuk ada kategori tinggi/bagus (antara 3,34 - 5,00).

3. Penilaian (X3)

Variabel penilaian (X3) pada penelitian ini diukur melalui tiga item pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Untuk mengetahui gambaran penilaian responden terhadap variabel penilaian, disajikan dalam tabel 7 berikut

Tabel 7
Frekuensi/ Prosentase Indikator Variabel Penilaian

No	Indikator	Distribusi Jawaban Responden										Mean	Kategori
		STS		TS		N		S		SS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	X31	0	0	0	0	16	23,19	29	42,03	24	34,78	4,12	Tinggi
2	X32	0	0	0	0	28	40,58	8	11,59	33	47,83	4,07	Tinggi
3	X33	0	0	0	0	46	66,67	20	28,99	3	4,35	3,38	Tinggi
Mean Total Penilaian											4,10	Tinggi	

Sumber : Data primer, diolah penulis

Penilaian responden terhadap variabel penilaian pada tabel 7 dipersepsikan bagus dan positif terhadap jawaban dari pernyataan-pernyataan mengenai penilaian terlihat dari nilai mean total penilaian sebesar 4,10 yang masuk pada kategori tinggi/bagus (antara 3,34 - 5,00).

4. Optimalisasi Aset (Y)

Variabel optimalisasi aset pada penelitian ini diukur melalui 4 item pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Untuk mengetahui gambaran penilaian responden terhadap variabel optimalisasi aset disajikan dalam tabel 8 berikut.

Tabel 8
Frekuensi/ Prosentase Indikator
Variabel Optimalisasi Aset

No	Indikator	Distribusi Jawaban Responden										Mean	Kategori
		STS		TS		N		S		SS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Y1	0	0	0	0	2	2,90	37	53,62	30	43,48	4,41	Tinggi
2	Y2	0	0	0	0	0	0	30	43,48	39	56,52	4,57	Tinggi
3	Y3	0	0	0	0	0	0	41	59,42	28	40,58	4,41	Tinggi
4	Y4	0	0	0	0	0	0	33	47,83	36	52,17	4,52	Tinggi
Mean Total Optimalisasi Aset												4,48	Tinggi

Sumber : Data primer, diolah penulis

Penilaian responden terhadap variabel optimalisasi aset pada tabel 8 dipersepsikan bagus dan positif terhadap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai optimalisasi aset terlihat dari nilai mean total optimalisasi aset sebesar 4,48 yang masuk pada kategori tinggi/bagus (antara 3,34 - 5,00).

3.2. Uji Instrumen

Pengujian instrumen dalam penelitian yang menggunakan kuisisioner diperlukan untuk menentukan apakah alat pengukuran dapat digunakan atau tidak dalam proses pengumpulan data. Dalam pengujian ini dilakukan proses validitas dan reliabilitas jawaban kuisisioner. Dengan dilakukan proses pengujian ini diharapkan hasil hipotesis sesuai dengan yang diharapkan.

1. Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen yaitu menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikan 95% atau $\alpha=0,05$ (Santoso, 2004). Uji validitas dengan metode ini dilakukan mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Hasil korelasi harus signifikan berdasarkan ukuran statistik. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara fungsi item

dengan fungsi ukur secara keseluruhan atau dengan kata lain instrumen tersebut valid.

Validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment* kriteria pengujian yang digunakan pada instrumen tersebut jika nilai $r \geq 0,234$ (R Tabel). Adapun hasil uji validitas dari setiap item penelitian variabel dalam penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Hasil Uji Validitas Variabel
Inventarisasi (X1)

Item (Indikator)	r Hitung	Cut of Point	Status
X11	0,384	0,234	Valid
X12	0,779	0,234	Valid
X13	0,737	0,234	Valid

Sumber : Data primer, diolah penulis

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 9 maka diperoleh angka korelasi (r hitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan *cut of point* yang disyaratkan yaitu sebesar 0,234. Nilai *Correction Item Total Total Correlation* (r hitung) variabel Inventarisasi (X1) berada diantara 0,384 - 0,779. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung $> 0,234$ (*cut of point*), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuisisioner Inventarisasi (X1) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 10
Hasil Uji Validitas Variabel Legal
Audit (X2)

Item (Indikator)	r Hitung	Cut of Point	Status
X21	0,679	0,234	Valid
X22	0,689	0,234	Valid
X23	0,326	0,234	Valid

Sumber : Data primer,
diolah penulis

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 10 maka diperoleh angka korelasi (r hitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan *cut of point* yang disyaratkan yaitu sebesar 0,234. Nilai *Correction Item Total Total Correlation* (r hitung) variabel Legal Audit (X2) berada diantara 0,326 - 0,689. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung $> 0,234$ (*cut of point*), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuisisioner Legal Audit (X2) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 11
Hasil Uji Validitas Variabel
Penilaian (X3)

Item (Indikator)	r Hitung	Cut of Point	Status
X31	0,374	0,234	Valid
X32	0,838	0,234	Valid
X33	0,434	0,234	Valid

Sumber : Data primer,
diolah penulis

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 11 maka diperoleh angka korelasi (r hitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan *cut of point* yang disyaratkan yaitu sebesar 0,234. Nilai *Correction*

Item Total Total Correlation (r hitung) variabel Penilaian (X3) berada diantara 0,374 - 0,838. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung $> 0,234$ (*cut of point*), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuisisioner Penilaian (X3) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 12
Hasil Uji Validitas Variabel
Optimalisasi Aset (Y)

Item (Indikator)	r Hitung	Cut of Point	Status
Y1	0,517	0,234	Valid
Y2	0,635	0,234	Valid
Y3	0,484	0,234	Valid
Y4	0,260	0,234	Valid

Sumber : Data primer,
diolah penulis

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 12 maka diperoleh angka korelasi (r hitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan *cut of point* yang disyaratkan yaitu sebesar 0,234. Nilai *Correction Item Total Total Correlation* (r hitung) variabel Optimalisasi Aset (Y) berada diantara 0,260 - 0,63 Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung $> 0,234$ (*cut of point*), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuisisioner Optimalisasi Aset (Y) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau kehandalan instrumen merupakan

pengujian tingkat konsistensi instrumen itu sendiri. Instrumen yang baik harus konsisten dengan butir yang diukur. Keandalan instrumen dalam penelitian akan dianalisis dengan teknik *alpha cronbach* dengan menggunakan bantuan sarana komputer program SPSS. Nilai batas atau (*cut of point*) yang diterima untuk tingkat *alpha cronbach* adalah $\geq 0,60$, walaupun ini bukan merupakan standar absolute (Sekaran, 2003). Adapun hasil uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Hasil Uji Reliabilitas
Instrumen Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cut of Point</i>	Status
Inventarisasi (X1)	0,715	0,60	Reliabel
Legal Audit (X2)	0,675	0,60	Reliabel
Penilaian (X3)	0,658	0,60	Reliabel
Optimalisasi Aset (Y)	0,690	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer, diolah penulis

Dari tabel 13 pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha* dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diukur (*cut of point*) adalah $\geq 0,60$. Berdasarkan hasil pengolahan data pada uji reliabilitas ini diperoleh nilai koefisien reliabilitas (*Cronbahe's Alpha*) untuk variabel inventarisasi (X1) sebesar 0,715; variabel legal audit (X2) sebesar 0,675; variabel penilaian (X3) sebesar 0,658 dan variabel optimalisasi aset (Y) sebesar 0,690. Karena seluruh nilai komersial *Cronbahe's Alpha* pada masing-masing variabel berada diatas ambang batas (*cut off point*) 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima.

3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 14
Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	Koefisien Regresi		Std. Error	t. Hitung	Sig
	Unstandardized	Standardized			
(Constant)	6,656		0,727	9,151	0,000
Inventarisasi (X1)	0,382	0,545	0,042	9,122	0,000
Legal Audit (X2)	0,495	0,531	0,059	8,452	0,000
Penilaian (X3)	0,122	0,165	0,048	2,513	0,014
R2	0,790				
F Hitung	81,750				
Sig (f)	0,000				

Sumber : Data primer, diolah penulis

Untuk melihat pengaruh inventarisasi, legal audit dan penilaian terhadap optimalisasi aset, maka digunakan analisa regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS 25.0 dapat dilihat rangkuman hasil empiris penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 14 diatas, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu: $Y = 6,656 + 0,382X_1 + 0,495X_2 + 0,122X_3$. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna bahwa pengaruh inventarisasi, legal audit dan penilaian terhadap optimalisasi aset adalah positif dimana saat inventarisasi, legal audit dan penilaian membaik akan meningkatkan optimalisasi aset. Hal ini mengindikasikan bahwa saat inventarisasi, legal audit dan penilaian meningkat maka akan diikuti peningkatan optimalisasi aset.

3.4. Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Parsial dengan T-Test

- a. Nilai t hitung untuk variabel Inventarisasi terhadap Optimalisasi Aset diperoleh 9.122 dengan harga signifikansinya 0.000 menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan karena harga

signifikan yang diperoleh kurang dari 0.05, hal ini berarti bahwa variabel Inventarisasi (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Aset (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka *hipotesis 1* yang menyatakan inventarisasi secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, *diterima*.

b. Nilai t hitung untuk variabel Legal Audit terhadap Optimalisasi Aset diperoleh 8.452 dengan harga signifikansinya 0.000 menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan karena harga signifikan yang diperoleh kurang dari 0.05, hal ini berarti bahwa variabel Legal Audit (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Aset (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka *hipotesis 2* yang menyatakan Legal Audit secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, *diterima*.

c. Nilai t hitung untuk variabel Penilaian terhadap Optimalisasi Aset diperoleh 2.513 dengan harga signifikansinya 0.014 menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan karena harga signifikan yang diperoleh kurang dari 0.05, hal ini berarti bahwa variabel Penilaian (X3) memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Aset (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka *hipotesis 3* yang menyatakan Penilaian secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, *diterima*.

2. Uji Simultan dengan F-Test (Anova^b)

Uji F untuk menentukan apakah secara serentak/bersama-sama variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pada tabel Anova dapat dilihat pengaruh variabel independen Inventarisasi (X1), Legal Audit (X2) dan Penilaian (X3) terhadap variabel independen Optimalisasi Aset (Y) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara simultan/bersama.

Berdasarkan tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan uji F menggunakan program komputasi SPSS for windows 25 diperoleh F hitung = 81.750 dengan harga signifikansi sebesar 0.000. Karena harga signifikansi kurang dari 0.05, maka nilai F hitung yang diperoleh tersebut signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan Inventarisasi, Legal audit dan penilaian terhadap optimalisasi aset tetap di Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan hasil diatas, maka *hipotesis 4* yang menyatakan inventarisasi, legal audit dan penilaian berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, *diterima*.

3. Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Derajat hubungan antar inventarisasi, legal audit dan penilaian terhadap optimalisasi aset secara bersama-sama atau secara simultan dapat diketahui dari harga korelasi secara simultan atau R sebagaimana pada tabel 4.14. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai R square sebesar 0,790. Hal Ini mengindikasikan bahwa kuat pengaruh secara bersama-sama variabel inventarisasi, legal audit dan penilaian terhadap optimalisasi aset masuk dalam kategori sangat kuat. Besarnya pengaruh inventarisasi, legal audit dan penilaian dapat diketahui dari harga koefisien determinasi simultan (R Square) yang menunjukkan secara bersama-sama inventarisasi, legal audit dan penilaian memiliki pengaruh sebesar 79,0% terhadap optimalisasi aset. Sedangkan selebihnya sebesar 21,0% adalah pengaruh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya,

selanjutnya akan dibahas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Inventarisasi Terhadap Optimalisasi Aset

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t sebesar 9.122 dengan harga signifikansi 0.000 menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh tersebut signifikan karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0.05. Hal ini berarti bahwa variabel inventarisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi aset.

Berdasarkan nilai koefisien regresi menunjukkan tanda positif yaitu sebesar 0,382 maka dapat disimpulkan bahwa inventarisasi berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Artinya bahwa peningkatan inventarisasi aset menyebabkan peningkatan optimalisasi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pengaruh Legal Audit terhadap Optimalisasi Aset

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh legal audit terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t sebesar 8.452 dengan harga signifikansi 0.000 menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0.05. Hal ini berarti bahwa

variabel legal audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi aset.

Berdasarkan nilai koefisien regresi menunjukkan tanda positif yaitu sebesar 0,495 maka dapat disimpulkan bahwa legal audit berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Artinya bahwa peningkatan legal audit menyebabkan peningkatan optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Pengaruh Penilaian terhadap Optimalisasi Aset

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh penilaian terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t sebesar 2,513 dengan harga signifikan 0,014 menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh tersebut signifikan karena harga signifikan yang diperoleh kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi aset.

Berdasarkan nilai koefisien regresi menunjukkan tanda positif yaitu sebesar 0,122 maka dapat disimpulkan bahwa penilaian berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. Artinya bahwa peningkatan penilaian menyebabkan peningkatan optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit dan Penilaian terhadap Optimalisasi Aset

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh variabel independen Inventarisasi, Legal Audit dan Penilaian terhadap variabel independen Optimalisasi Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara simultan/bersama. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh diperoleh F hitung = 81.750 dengan harga signifikansi sebesar 0.000. Karena harga signifikansi kurang dari 0.05, maka nilai F hitung yang diperoleh tersebut signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan Inventarisasi, Legal audit dan penilaian terhadap optimalisasi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya akan menjelaskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap optimalisasi aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Legal Audit berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Penilaian berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap optimalisasi aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Inventarisasi, legal audit dan penilaian berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap optimalisasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, secara terperinci dapat dikemukakan saran-saran baik untuk pengembangan pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis. Adapun saran-saran penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu perlu meningkatkan faktor inventarisasi, legal audit dan penilaian yang menjadi faktor-faktor penting yang berpengaruh secara langsung terhadap optimalisasi aset.
2. Peneliti merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan perhatian khusus melalui pemberian *punishment* dan *reward* dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagai faktor yang dominan terhadap peningkatan optimalisasi aset.
3. Peneliti merekomendasikan kepada penelitian berikutnya agar dapat menambahkan variabel independen sebagai penggambaran kepada manajemen agar dapat diperoleh hasil yang lebih mendalam terkait optimalisasi aset.
4. Peneliti juga merekomendasikan untuk penelitian berikutnya agar memperluas lingkup penelitian agar dapat diperoleh jumlah responden dan observasi yang lebih banyak sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih baik secara statistik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke- 8, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Bertovic, Hrugo; Kaganova, Olga; Rutledge, John, 2002, *Asset Management Model for Local Governments, Local Government Reform Project (LGRP)*, The Urban Institute.
- Bohn, Henning 2002. *Government Asset and Liability Management in an Era of Vanishing Public Debt*. Department of Economics. University of California at Santa Barbara.
- Bloomquisht, Rob, dan Jim Oldach, 2005, *Optimizing Plant Assets, through Improved Reliability Practices*, *The Journal Orbit*, Vol 25 No.1, halaman 31- 37.
- Carn, N, R. Black dan J. Rabianski. 1999. *Operational and Organisational Issue Facing Corporate Real Estate Executive and Managers*. *Journal of Real Estate Research*, 17(3): 281-99.
- Hasanuddin, 2016, *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat*.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan /Manajemen*, BPFE, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Jusmin, 2013, *Pengaruh Manajemen Aset Tetap Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pada Pemerintah Daerah Di Kota Baubau*.
- Kuncoro, Mudrajad, 2001, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, UPP AMP YKPN, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad, 2003, *Analisis Efektifitas Manajemen Aset Properti Riil Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2001/2002)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 4(02): 1-9.

- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, *Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Money, Participatory Development*, Serial Otonomi Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Mather, Daryl, 2003, *The Strategic Importance of Asset Management*, Speaker and Management Consultant, Australia.
- Musthafa, 2013. *Manajemen Keuangan*. Surabaya. Badan Penerbit STIE Mahardhika
- Pakiding, Yanuarius, 2006, Hubungan Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bantul), *Tesis S2 Program Pascasarjana UGM*, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Phahlevi, Muhammad Reza, 2002, Manajemen Aset Real Estate Pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya, *Tesis S2 Program Pascasarjana UGM*, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Rosyadi, 2006, Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Non Operasional Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, *Tesis S2 Program Pascasarjana UGM*, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Schaeffers, Wolfgang, 1999, Corporate Real Estate (CRE) Management: Evidence from German Companies, *Journal Of Real Estate Reaserch*, Volume 17, Number 3, halaman 301-320.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. 1987, *Metode Penelitian Survai*, Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial, Jakarta.
- Siregar, Doli. D, 2004, *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfa Beta, Bandung.
- Suharno, 2001, Peningkatan Profesionalisme Penilai Pemerintah, *Jurnal Survey dan Penilaian Properti*, 22(3).
- Sulistioyowati, Firma, 2003, Pengelolaan Aset Tetap: Tinjauan terhadap Aset Tetap Pelimpahan dari Kandep ke Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 04, No. 02, Agustus, halaman 20-29.
- Sumbambang, Budiono, 2004, Titik Tolak Pemikiran untuk Peningkatan Kinerja Pengelolaan Aset Daerah, *Summary Executive*, disampaikan pada *Pertemuan dengan Masyarakat Penilai*, Jakarta, 15 Februari.

Supranto, Johanes, 2004, *Analisis Multivariat, Arti dan Interpretasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wahyuni. A, 2012, *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat*.

Wardhana.I.H., 2005, *Mengelola Aset Kota Jakarta, Jurnal Kajian Pengembangan Perkotaan*, Vol 01, No. 01, April, halaman 7-10.

Widayanti, E. 2010, *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten. Studi Kasus di Kabupaten Sragen*